



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 139 TAHUN 2021  
TENTANG  
LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI KALURAHAN GILANGHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kabupaten Bantul yang efisien, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pemilik tanah dan masyarakat serta menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungannya, perlu dilaksanakan penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi konsolidasi tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Konsolidasi Tanah di Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI KALURAHAN GILANGHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Lokasi Konsolidasi Tanah terletak di Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul seluas 3.645 m<sup>2</sup>.
- KEDUA : Peta Lokasi Konsolidasi Tanah di Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Setiap pemilik hak atas tanah atau peserta konsolidasi tanah selama proses pelaksanaan konsolidasi tanah tidak diperbolehkan melakukan peralihan hak atas tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa adanya izin dari Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Setelah dilaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah, akan dilakukan pembangunan sarana dan prasarana terhadap tanah untuk pembangunan sesuai rencana pembangunan Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Maret 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

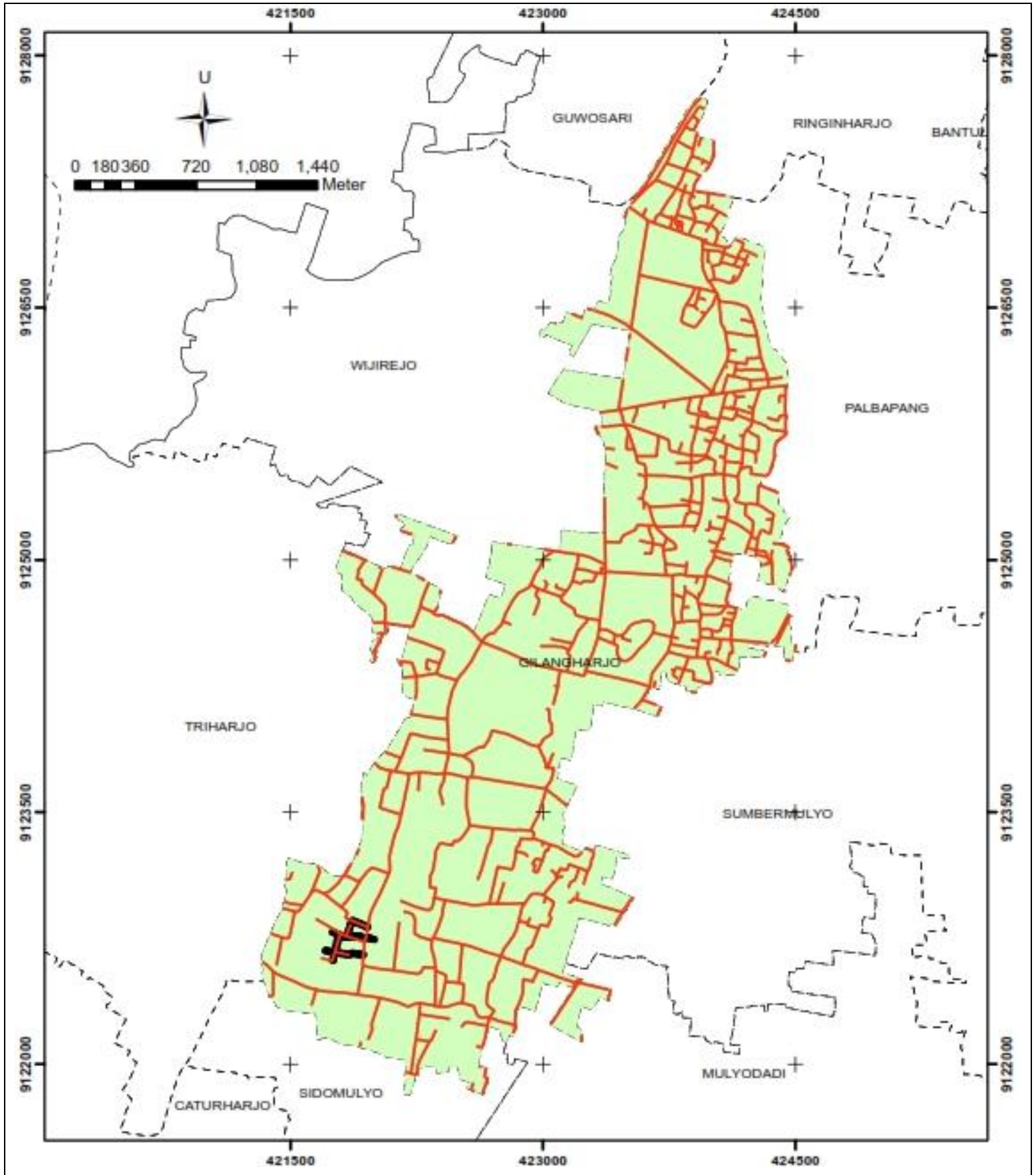
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
  2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  3. Kepala Kantor Wilayah BPN DIY;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
  7. Panewu Pandak Kabupaten Bantul;
  8. Lurah Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 139 TAHUN 2021  
TENTANG  
LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI KALURAHAN  
GILANGHARJO KAPANEWON PANDAK  
KABUPATEN BANTUL

PETA LOKASI KONSOLIDASI TANAH



Keterangan

Jalan      - - - - Batas Desa      Area Konsolidasi

BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
ABDUL HALIM MUSLIH